

**RESPON GERAKAN MUJAHIDIN ROHINGYA TERHADAP
KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH MYANMAR TAHUN 1948-1962**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

MUHAMMAD ADI SAPUTRO

Nim: 11120053

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Saputro
NIM : 11120053
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Saya yang menyatakan,



Muhammad Adi Saputro
NIM: 11120053

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**Respon Gerakan Mujahidin Rohingya terhadap Kebijakan Politik
Pemerintah Myanmar Tahun 1948-1962**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Adi Saputro
NIM : 11120053
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Dosen Pembimbing,



Drs. Sujadi, M.A.
NIP. 19701009 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : adab@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DA/PP.009/ 1447 /2015

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul:

**RESPON GERAKAN MUJAHIDIN ROHINGYA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK
PEMERINTAH MYANMAR TAHUN 1948-1962**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. ADI SAPUTRO

NIM : 11120053

Telah dimunaqosyahkan pada : **Senin, 22 Juni 2015**

Nilai Munaqosyah : **B**

Dan telah dinyatakan diterima oleh **Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Sujadi, MA

NIP 19701009 199503 1 001

Penguji I

Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag

NIP 19580117 198503 2 001

Penguji II

Fatiyah, S. Hum., M.A

NIP 19811206 201101 2 003

Yogyakarta, 29 Juni 2015
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Zamzam Afandi, M. Ag

NIP. 19631111 199403 1 002

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

**Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi
rahmat.¹**

¹ Q.S. 3 (Ali Imran): 132

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Buat Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah.

Kalian telah memberikan kasih sayang, segala dukungan yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat aku balas dengan hanya selembar kertas yang bertulisan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga.

Karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk kalian.

Untuk Ibu dan Ayah...

Yang telah membuatku termotivasi dan selalu meyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, dan selalu menasehatiku menjadi yang lebih baik.

Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

ABSTRAK

Kebijakan U Nu yang disandarkan pada ajaran agama Budha berdampak buruk terhadap eksistensi dari etnis minoritas non Budha termasuk muslim Rohingya. Berbagai masalah yang dialami muslim Rohingya merupakan wujud diskriminasi yang digencarkan oleh pemerintah pusat maupun Magh Budha. Akibat kebijakan tersebut muncul repon dari salah satu organisasi Rohingya yaitu gerakan Mujahidin. Gerakan tersebut berupaya memperbaiki keadaan muslim Rohingya di Arakan. Cara yang ditempuh gerakan Mujahidin antara lain dengan menuntut pemerintah pusat. Bentuk-bentuk tuntutan yang dilakukan gerakan Mujahidin ditinjau dari masalah-masalah di berbagai bidang baik politik, sosial dan pendidikan. Selain menuntut, gerakan Mujahidin Rohingya juga melakukan pemberontakan terhadap pasukan pemerintah dan orang Magh Budha. Kiprah dari gerakan Mujahidin tersebut hanya berlangsung selama pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguak penyebab kemunculan gerakan Mujahidin Rohingya dalam merespon kebijakan politik pemerintah Myanmar serta bentuk-bentuk respon dari gerakan tersebut.

Penelitian mengenai respon gerakan Mujahidin Rohingya terhadap kebijakan politik di Myanmar merupakan bentuk sejarah politik. Oleh karena itu penelitian menggunakan pendekatan politik. Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. Kebijakan tersebut merupakan keputusan-keputusan yang mengikat banyak orang yang dibuat oleh pemegang otoritas politik. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa yang idealnya dalam masyarakat demokrasi merupakan cerminan pendapat publik. Peneliti juga menggunakan teori konflik dalam mengupas konflik-konflik yang terjadi. Max Weber berpendapat bahwa konflik kepentingan antara mayoritas dan minoritas adalah konflik stratifikasi sosial. Hal ini ditandai dengan kedua belah pihak berusaha mendapatkan posisi yang pantas diperjuangkan dalam berbagai sektor, baik kekuasaan, keagamaan, filsafat sosial, gagasan, ide, cita-cita sampai tentang gaya hidup. Ada tiga pokok bahasan dalam penggunaan teori konflik yaitu negara, partisipasi politik, dan kekuasaan.

Hasil penelitian dari skripsi ini yang berjudul respon gerakan Mujahidin Rohingya terhadap pengaruh kebijakan politik pemerintah Myanmar tahun 1948-1962 terdapat dua aspek. Aspek tersebut meliputi tuntutan dan pemberontakan. Respon tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah Myanmar dan orang Magh Budha yang mendiskriminasi muslim Rohingya. Ada beberapa kebijakan politik yang dirasa merugikan pihak-pihak minoritas termasuk muslim Rohingya di negara Myanmar. Kebijakan tersebut yang mengakibatkan masalah-masalah yang dialami muslim Rohingya. Sehingga Memunculkan tuntutan seperti pembentukan daerah otonom muslim, pendidikan yang berbasis Islam. Selain itu ada pemberontakan yang terbagi dalam tiga periode. Tahun 1948 sebagai fase awal pemberontakan. Tahun 1949-1950 sebagai fase puncak pemberontakan. Yang terakhir tahun 1951-1962 merupakan fase kemunduran gerakan Mujahidin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
لا	lam alif	la	el dan a
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dlammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ يـِ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
ـِ وـِ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

حسين : ḥusain

حول : ḥauli

3. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
سَا	Fatḥah dan alif	â	a dengan caping di atas
سَيِ	Kasrah dan ya	î	i dengan caping di atas
سُو	Dlammah dan wau	û	u dengan caping di atas

4. *Ta Marbutah*

- Ta Marbutah* yang dipakai di sini dimatikan atau diberik harakat sukun, dan transliterasinya adalah / h /.
- Kalau kata yang diakhiri dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang bersandang / al /, maka kedua kata itu dipisah dan ta marbutah ditransliterasi dengan / h /.

Contoh:

فا صمة : Fâtimah

مكة المكرمة : Makkah al-Mukkaramah

5. *Syaddah*

Syaddah / tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَزَّل : nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang “ ال ” dilambangkan dengan “ al “, baik yang diikuti dengan huruf syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah.

Contoh:

الشمس : al-syamsiyah

الحكمة : al-hikmah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rosulullah, manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Respon Gerakan Mujahidin Rohingya terhadap Kebijakan Politik Pemerintah Myanmar tahun 1948-1962” ini merupakan upaya penulisan untuk memahami aplikasi dari kebijakan politik pemerintahan dan reaksi dari masyarakat semasa itu. Penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, jika skripsi ini akhirnya selesai, maka hal itu bukan karena usaha penulis sendiri, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, mendo’akan dan memberi dukungan kepada penulis.
2. Keluarga besar dirumah, yang telah memberi do’a, dukungan dan harapan untuk kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
5. Ketua, dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.
6. Drs. Maman Abdul Malik Sya’roni M.S, selaku dosen Penasihat Akademik (PA).

7. Drs. Sujadi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang sangat bernilai kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan segenap Staf Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
9. Muhamadi sebagai saudara yang telah mengerti kondisi keuanganku selama berjuang mencari ilmu di Yogyakarta.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapat imbalan dari Allah swt.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Penulis.



Muhammad Adi Saputro
NIM: 11120053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : GAMBARAN UMUM MUSLIM ROHINGYA DI ARAKAN	
A. Geografi Arakan	19
B. Demografi Arakan	22
C. Dinamika Islam di Arakan.....	25
1. Masa Awal Masuknya Islam.....	25
2. Masa Kerajaan Mrauk U	27
3. Masa Penjajahan Inggris-Jepang.....	31
4. Masa Awal Kemerdekaan	34

BAB III : KEMUNCULAN GERAKAN MUJAHIDIN ROHINGYA DI MYANMAR	
A. Latar Belakang Kemunculan Gerakan Mujahidin Rohingya	36
B. Visi–Misi Gerakan Mujahidin Rohingya	38
C. Kegiatan Gerakan Mujahidin Rohingya	43
BAB IV : PERLAWANAN GERAKAN MUJAHIDIN ROHINGYA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH MYANMAR	
A. Kebijakan Politik Pemerintah Myanmar	48
1 Pembentukan Negara Bagian	48
2 Agama Budha sebagai Agama Resmi Negara	51
3 Pelaksanaan Struktur Politik Berlandaskan Budhisme	52
B. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Muslim Rohingya	56
1 Masalah Politik	57
2 Masalah Sosial	59
3 Masalah Pendidikan	62
C. Perlawanan Gerakan Mujahidin Rohingya	63
1. Periode 1948 (Fase Awal Perlawanan)	64
2. Periode 1999-1950 (Fase Puncak Perlawanan)	73
3. Periode 1951-1962 (Fase Kemunduran Gerakan Mujahidin)	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Kritik dan Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Negara Myanmar

Gambar 2 Peta Negara Bagian Arakan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki peranan penting dalam menstabilkan kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dalam peranannya, negara memegang otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan definisi politik pada umumnya menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan.¹ Oleh karena itu gejala-gejala masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus serta rekrutmen dan perilaku kepemimpinan menjadi perhatian dalam ilmu politik.

Pemerintah sering dihadapkan pada benturan-benturan antar kepentingan dalam menentukan kebijakan politik, baik antar ideologi, agama atau benturan antar mayoritas dan minoritas. Dalam pengambilan kebijakan, suara mayoritas lebih dipertimbangkan dan representif dari pada minoritas. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan mayoritas dan tidak mengakomodir suara minoritas, kerap menimbulkan gesekan dan pertengkaran antar golongan. Minoritas umumnya didefinisikan dalam terma angka, yang menunjukkan bahwa diwilayah mereka tinggal, jumlah mereka lebih sedikit

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 173.

dibandingkan dengan semua kelompok lain, termasuk mayoritas.² Terma itu juga bisa merujuk pada istilah ideologis. Oleh karena itu, minoritas adalah orang-orang yang sistem pemikiran atau sistem nilainya berbeda pada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan mayoritas di sekeliling mereka.³

Gesekan antara mayoritas dan minoritas dalam sebuah negara sering menjadi sorotan publik nasional maupun internasional. Hal ini karena negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan mengayomi segenap warganya. Salah satu konflik yang berkepanjangan antar mayoritas dan minoritas yang sering disoroti adalah konflik di negara Myanmar⁴ antara etnis Rohingya dan etnis Magh. Dua etnis tersebut berada di wilayah Negara Bagian Arakan, yaitu wilayah Myanmar bagian barat. Kedua kelompok ini merepresentasikan dua komunitas keagamaan yaitu etnis muslim Rohingya dan etnis Magh Budha.⁵

Arakan bagian utara didiami mayoritas muslim Rohingya sedangkan di selatan mayoritas dari penduduk Magh Budha. Muslim Rohingya menetap di Arakan sudah sejak abad ke-7 dan mereka tidak terbentuk dari satu suku saja.⁶ Ada yang menunjukkan bahwa orang Rohingya termasuk ras Creole, keturunan

² John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 64.

³ *Ibid.*

⁴ Myanmar dulu dikenal dengan Burma. Dalam Skripsi ini menggunakan istilah Myanmar. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara

⁵ Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 195.

⁶ Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Dinamika Islam Filipina, Myanmar, dan Thailand* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2013), hlm. 249.

orang Arab, Turki, Persia, Pathan, Mogul, Bengalis, dan Indo-Mongoloid.⁷ Konflik antar dua kelompok ini telah bermula dari sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1948. Pada masa perang dunia II, terjadi konflik dengan adanya perbedaan keberpihakan pada penjajah. Muslim Rohingya lebih memihak Inggris sedangkan Magh Budha berpihak kepada Jepang.

Peristiwa yang paling merugikan terjadi pada tahun 1942 ketika adanya pengusiran besar-besaran terhadap muslim Rohingya. Hal tersebut berlanjut pada masa awal kemerdekaan yaitu masa pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Ada beberapa kebijakan politik dari Perdana Menteri U Nu yang menjadi kontroversi dan berdampak buruk pada masyarakat Myanmar. Rentetan kebijakan pemerintah Myanmar yang dianggap tidak sesuai dengan kemaslahatan umat adalah pertama, seruan agama Budha sebagai agama resmi. Kedua, pelaksanaan struktural politik berlandaskan Budhisme. Ketiga, pembentukan daerah otonom yang tidak merata. Hal ini memunculkan berbagai aksi penolakan dari etnis-etnis lain yang beragama non Budha. Salah satu dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut yaitu dikuasainya pemerintahan di Negara Bagian Arakan oleh Magh Budha.

Hampir semua sektor kehidupan publik di Arakan dikuasai oleh Budha Arakan. Berbeda dengan Magh, kesempatan Rohingya untuk menjadi pejabat publik sangat kecil.⁸ Porsi yang tidak berimbang, etnis Rohingya kerap mengalami ketimpangan keadilan dan diskriminasi hukum. Maka dengan kewenangan yang dimiliki Magh Budha mengakibatkan penderitaan baik

⁷ Bilver Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, terj. Nin Bakdisoemanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 12.

⁸ Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Dinamika Islam*, hlm. 261.

dalam bidang politik, sosial, maupun pendidikan. Dalam catatan sejarahnya, etnis Rohingya sering mengalami pengusuran tanah oleh kaum Magh Budha. Rentetan peristiwa yang dipaparkan oleh Singh, muslim Rohingya yang diusir pada tahun 1942 bahkan tidak bisa kembali ke desanya lagi. Terlebih lagi, Pemerintah Rangoon malah mendukung terjadinya pembasmian etnis dan menghilangkan identitas etnis Rohingya dengan mengambil kembali tanah-tanah Rohingya untuk Budha.⁹

Etnis muslim Rohingya melakukan perlawanan untuk menghadapi konflik dan diskriminasi. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam memperbaiki keadaan muslim Rohingya akibat adanya diskriminasi tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin Rohingya. Gerakan tersebut sangat tenar pada masa itu. Tujuan dari Gerakan Mujahidin adalah untuk menciptakan sebuah daerah otonomi Muslim di Arakan.¹⁰ Oleh karena itu gerakan tersebut berusaha untuk memperbaiki keadaan muslim Rohingya.

Pada April 1948, banyak Muslim Rohingya yang dipimpin oleh Mawlana Jafar Hussain (atau Jaffar Kawwal), mengumpulkan jemaahnya di kota Taung Bazar di Arakan barat daya dan memulai pemberontakan Mujahidin.¹¹ Ratusan pendukung Muslim bersenjata berbondong-bondong untuk bergabung dengan Jaffar Kawwal untuk menekan permintaan sebuah

⁹ *Ibid.*, hlm. 262

¹⁰ http://twocircles.net/2012jul29/rohingya_muslims_brief_history_persecution.html#.VOVdeC79nIU, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

¹¹ Bilver Singh, *Tantangan*, hlm. 69.

negara Islam di utara.¹² Pemimpin muslim Rohingya mulai menyerukan jihad melawan pendudukan Arakan, dan target utama penyerangan ini adalah penduduk lokal beragama Budha, bukan perwakilan pemerintah Pusat.¹³ Selanjutnya, para pemberontak bertempur sengit melawan polisi dan angkatan bersenjata Myanmar yang ditempatkan di Arakan untuk mengepung wilayah ini dalam waktu yang relatif panjang.¹⁴

Pemerintah pusat yang lemah, ditambah dengan kekacauan yang terjadi di Myanmar menyebabkan pemberontakan yang dilakukan Mujahidin berkembang semakin cepat. Oleh karena kondisi pemerintah yang sedang kacau tersebut, maka kurang melakukan tindakan pencegahan hingga 1951. Antara tahun 1951-1954, tentara Myanmar lebih memfokuskan perhatiannya terhadap Arakan. Serangkaian aksi diadakan untuk meredam tindakan gerakan Mujahidin.¹⁵ Aksi tersebut berpuncak pada November 1954 dengan nama “Operation Mansoon”.¹⁶ Operasi besar-besaran tersebut akhirnya dapat merusak kekuatan gerakan Mujahidin dan membunuh pemimpin-pemimpin mereka. Pada tahun 1962 pemberontakan ini tampaknya berhenti setelah akhirnya Mujahidin menyerah pada tahun 1961.¹⁷

Pemberontakan kelompok mujahidin Rohingya terhadap kebijakan politik pemerintah dalam rentang waktu 1948-1962 sangat menarik untuk

¹² <http://www.kaladanpress.org/index.php/scholar-column-mainmenu-36/36-rohingya/194-the-muslim-rohingya-of-Myanmar.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

¹³ Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, hlm. 66.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵ Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Dinamika Muslim*, hlm. 261.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://www.rohingyana.org/history.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

dikaji. Pertama, pemberontakan ini tidaklah murni terjadi akibat konflik antar etnis dan agama, tetapi diawali dengan konflik kebijakan politik yang tidak seimbang. Dengan menjadikan agama Budha sebagai agama resmi negara, mengakibatkan beberapa kebijakan pemerintah hanya terfokus pada kesejahteraan masyarakat yang beragama Budha. sedangkan etnis-etnis lain termasuk muslim Rohingya mengalami diskriminasi.

Kedua, konflik adalah permasalahan universal yang dihadapi semua negara, keberpihakan negara pada kelompok tertentu akan mengakibatkan tumpang tindih dan tidak seajarnya hak asasi setiap warga negara, dan jika hak asasi diceraabut, maka itu bukan semata-mata konflik kepentingan, tetapi konflik kemanusiaan. Ketiga, pemberontakan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu menunjukkan adanya kebijakan yang tidak populis sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi dan pemberontakan. Faktor pemicu inilah yang kemudian menarik untuk dikaji.

B. Rumusan dan Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan, maka penelitian ini akan difokuskan pada gerakan mujahidin Rohingya dalam merespon ketidakadilan kebijakan pemerintah Myanmar. Oleh karena itu penulis merumuskan dua rumusan masalah:

1. Apa yang melatarbelakangi kemunculan gerakan Mujahidin Rohingya ?
2. Bagaimana respon gerakan Mujahidin Rohingya terhadap kebijakan politik pemerintah Myanmar ?

Obyek dalam penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya Gerakan Mujahidin Rohingya dalam melawan kebijakan pemerintah Myanmar. Dideklarasikannya gerakan Mujahidin Rohingya diharapkan bisa mengatasi adanya diskriminasi dari pemerintah Myanmar maupun Magh Budha terhadap muslim Rohingya di Arakan. Dalam penelitian ini latar tempat melingkupi wilayah Negara Bagian Arakan. Hal tersebut karena Gerakan Mujahidin Rohingya eksis di Arakan.

Mengenai aspek waktu dalam kajian ini difokuskan pada masa pemerintahan U Nu, yaitu perdana menteri pertama negara Myanmar, yang dimulai sejak Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Batasan waktu diakhiri sampai berakhirnya pemerintahan U Nu pada bulan Maret 1962 yang digantikan oleh Jenderal Ne Win. Pada masa itu juga berakhirnya gerakan Mujahidin Rohingya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi pemahaman bahwa status kewarganegaraan muslim Rohingya merupakan penduduk asli Myanmar.
2. Untuk mengemukakan upaya gerakan-gerakan Rohingya dalam mempertahankan eksistensi penduduk muslim Rohingya di Myanmar.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, antara lain :

1. Kepada mahasiswa dan dosen Sejarah. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam melakukan kajian tentang Sejarah Islam di Myanmar beserta problematika yang ada.
2. Kepada peneliti: penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemicu dan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang perlawanan muslim Rohingya terhadap kebijakan pemerintahan Myanmar.
3. Kepada Masyarakat Umum: penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran akan pentingnya mempertahankan tanah air dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai upaya-upaya mencapai kesejahteraan kaum minoritas di suatu negara.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan tentang respon muslim Rohingya terhadap kebijakan pemerintah Myanmar tahun 1948-1962 ini menarik untuk dikaji dan bukan penelitian yang pertama. Telah ada beberapa karya ilmiah baik berupa buku atau skripsi yang terkait dengan Gerakan Mujahidin Rohingya. Karya-karya tersebut antara lain :

Yang *pertama* adalah buku berjudul “*Between Integration and Seccesion (The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar)*” karya Moshe Yegar. Buku tersebut diterbitkan oleh Lexington Book di Amerika Serikat. Dalam buku tersebut dikupas permasalahan yang dialami komunitas muslim Moro di Filipina bagian Selatan, muslim Pattani di Thailand bagian selatan dan muslim

Rohingya di Myanmar bagian barat. Kaitannya dengan penelitian ini adalah mengupas permasalahan mengenai muslim Rohingya di Myanmar. Bab dalam buku ini yang menjelaskan mengenai muslim Rohingya dikupas dari masa penjajahan Inggris sampai pemerintahan junta militer. Jadi didalamnya dibahas mengenai gerakan Mujahidin. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak dikupas mengenai bentuk-bentuk kebijakan politik dari Perdana Menteri U Nu.

Yang kedua, buku berjudul "*A History of Arakan (Past and Present)*" merupakan karya Mohammed Yunus. Beliau adalah presiden dari *Rohingya Solidarity Organisation (RSO)* di Arakan. Buku tersebut merupakan edisi pertama yang diterbitkan tahun 1994. Isi dalam buku ini mengupas dari keadaan geografi dan demografi serta periode-periode yang terjadi di Arakan. Periode-periode tersebut dimulai dari masa kerajaan Hindu-Budha sampai pemerintahan militer dibawah naungan *State Law and Order Restoration Council (SLORC)*. Kaitannya dengan penelitian ini adalah dalam periode-periode tersebut ada yang membahas mengenai pemberontakan Mujahidin. Selain itu juga dikupas sedikit mengenai keadaan pemilu di Arakan pada masa pemerintahan U Nu. Walaupun begitu perbedaan dengan penelitian ini tidak dibahas mengenai kebijakan politik dari pemerintah pusat.

Yang ketiga, buku berjudul "*Tantangan Orang Rohingya Myanmar (Menghadapi Satu Minoritas Muslim Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional)*" karya Bilveer Singh terjemahan Nin Bakdisoemanto. Buku tersebut diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press.

Dalam buku tersebut, Sigh menjelaskan keberadaan suku Rohingya. Mulai dari asal usul Muslim Rohingya, penganiayaan, Organisasi serta bentuk-bentuk konflik yang dialami Muslim Rohingya hingga kekinian. Penelitian ini hanya terfokus pada bentuk-bentuk perlawanan dari Muslim Rohingya terhadap kebijakan pemerintah Myanmar masa pemerintahan U Nu.

Yang keempat, buku berjudul “*Dinamika Islam Filipina, Myanmar, dan Thailand*” oleh Choirul Fuad Yusuf dkk. Buku tersebut diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan. Buku ini menjelaskan keberadaan muslim minoritas di tiga negara yaitu Filipina, Myanmar, dan Thailand. Di dalam bagian buku ini dijelaskan kondisi etnis Muslim Rohingya secara keseluruhan. Mulai dari pra kemerdekaan sampai masa pemerintahan U Nu dan Ne Win. Sedangkan dalam penelitian ini hanya mengupas satu gerakan muslim Rohingya pada masa pemerintahan U Nu.

Yang kelima, skripsi berjudul “*Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Paska Kemerdekaan Myanmar 1948 – 1988*”, oleh Azizah, mahasiswi Universitas Indonesia pada Program Studi Arab Fakultas Ilmu Budaya. Dalam skripsi ini penulis membahas keseluruhan bentuk pemberontakan sporadis yang terjadi pada tahun 1948-1988. Penulis menemukan bahwa latar belakang pemberontakan Muslim Rohingya awalnya adalah perbedaan keberpihakan pada penjajah masa perang dunia II. Penulis juga mengemukakan mengenai masa kepemimpinan terjadinya pemberontakan muslim Rohingya terbagi dalam dua periode, yaitu masa

pemerintahan U Nu dan Ne Win. Pemberontakan ini juga melibatkan berbagai kelompok seperti Mujahidin RPF, RSO, ARIF, dan lain sebagainya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah skripsi ini tidak membahas mengenai bentuk-bentuk kebijakan politik pemerintah U Nu sebagai penyebab munculnya respon dari gerakan Mujahidin. Penelitian ini juga hanya difokuskan pada satu periode yaitu masa pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Selain itu organisasi dalam kajian penelitian ini hanya gerakan Mujahidin Rohingya. Sedangkan respon yang dicetuskan oleh gerakan Mujahidin berupa tidak hanya pemberontakan tetapi juga tuntutan. Dengan demikian penelitian ini sebagai pelengkap dan memperkuat salah satu sub-bab dari skripsi Azizah.

E. Landasan Teori

Dalam mengupas respon muslim Rohingya terhadap kebijakan politik pemerintah Myanmar, peneliti menggunakan pendekatan Politik. Apabila politik itu sendiri diartikan sebagai pola distribusi kekuasaan maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus dipelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola dari kelakuan individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial.¹⁸

Politik juga mempunyai korelasi dengan struktur masyarakat dan hubungan sosial masyarakat sehingga tampak bagaimana otoritas pemimpin

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 18.

untuk memobilisasi pengikut, pengambilan keputusan kolektif dan munculnya konflik antar golongan.¹⁹ Jadi, semisal “konflik politik” akan dijadikan sasaran penelitian sejarah maka permasalahan serta eksplanasinya dapat dikembalikan kepada faktor-faktor sosial budaya dan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.²⁰

Adanya pemberontakan sebagai respon terhadap kebijakan politik pemerintah Myanmar, maka perlu adanya konsep pemberontakan. Menurut Ted Robert Gurr, yang dikutip oleh Riza Sihbudi, ada tiga penyebab terjadinya pemberontakan. Pertama, psikologis masyarakat akibat tekanan yang terus dilakukan sehingga menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan tersebut akan semakin cepat berkembang jika ada tokoh dari masyarakat yang tertindas turut mendukung bahkan menjadi pemimpin perlawanan tersebut. Kedua, perbedaan kelas antar masyarakat yang tajam, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial atau bahkan ketegangan sosial. Ketiga, rasa curiga akibat faktor suku atau agama dari pihak minoritas terhadap kaum mayoritas yang mendominasi.²¹

Dalam kasus Rohingya yang terjadi adalah konflik antara mayoritas dan minoritas. Peneliti menggunakan teori konflik guna mengupas konflik-konflik yang terjadi pada etnis muslim Rohingya di Myanmar. Max Weber berpendapat bahwa konflik timbul dari stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi

¹⁹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 149.

²⁰ Dudung Abdurahman, *Metode*, hlm. 20.

²¹ Riza Sihbudi, dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara: kasus Moro, Pattani, dan Rohingya* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hlm. 192.

adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya.²² Jadi konflik adalah situasi yang menyangkut hal terbaginya kedudukan-kedudukan sosial.²³ Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat.

Berkenaan dengan penggunaan teori konflik Max Weber, terdapat tiga pokok bahasan yang dipakai untuk membantu dalam pemecahan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Pokok Bahasan Negara

Menurut teori konflik, negara merupakan sekedar alat yang punya daya paksa yang dipakai kelas penguasa.²⁴ Oleh karena posisinya sebagai alat, negara tidak lagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peran dan fungsi negara adalah mengatur dan menstabilkan kubu-kubu yang saling berhadapan.

2. Pokok Bahasan Partisipasi Politik

Menurut Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik²⁵. Peran ini dapat dilakukan oleh orang dalam posisinya sebagai warganegara, partisipasi politik adalah hal konstitusional setiap warga negara dan merupakan sukarela. Partisipasi ini baik kelompok maupun

²² Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

²³ K. J. Veeger, *Realitas Sosial: Refirkis Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam cakrawala Sejarah Sosiolog* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 217.

²⁴ Mohtar Masoed Nasikun, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1987), hlm. 8.

²⁵ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 9-10.

perseorangan diharapkan mampu mempengaruhi arah kebijakan dan sebagai penyeimbang (*balance*) dalam memutuskan perkara.

Huntington menuturkan ada lima macam bentuk partisipasi politik. *Pertama* adalah kegiatan pemilihan. Kegiatan ini adalah kegiatan memberikan suara pada pemilihan umum. *Kedua* adalah Lobby, kegiatan ini dilakukan perorang untuk memberikan dukungan pada pihak tertentu dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya. *Ketiga* adalah kegiatan organisasi, kegiatan ini adalah kegiatan kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. *keempat* adalah *contacting*, kegiatan ini adalah upaya individu atau kelompok untuk memberikan dukungan mereka pada pihak tertentu, dan yang *kelima* adalah kekerasan atau *violence*. Hal ini bisa diwujudkan dengan bentuk kekerasan individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.²⁶

3. Pokok Bahasan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan itu.²⁷ Teori konflik menganggap kekuasaan sebagai mekanisme yang tidak sah dan hanya mementingkan kelompok yang mayoritas. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana keputusan dan pengambilan kebijakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 35.

selalu didominasi oleh suara mayoritas. Keputusan penguasa akan memberikan dampak represif pada minoritas.

Kekuasaan yang berdasarkan suara mayoritas tidak memberikan ruang gerak pada minoritas. Terbatasnya ruang gerak akan menimbulkan gerakan perlawanan dari pihak minoritas ke pihak mayoritas. Oleh karena itu, kekuasaan tidak lebih dari sekedar alat untuk mengeksploitasi satu pihak ke pihak yang lain. Weber menekankan arti penting kekuasaan dalam setiap tipe hubungan sosial. Kekuasaan merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi dan memobilisasi. Pada saat yang bersamaan, kekuasaan menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.²⁸ Penelitian sejarah adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada sumber pustaka atau (*library research*), yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta menggunakan data pustaka. Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi :

²⁸ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

1. Heuristik

Tahap ini merupakan kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil-tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka sumber yang diperlukan adalah buku mengenai muslim Rohingya yang didapat dari perpustakaan maupun dari internet. Selain itu penelitian ini menggunakan sumber dari skripsi dan disertasi.

2. Verifikasi

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data akan dicatat dalam lembaran lepas, agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan. Kritik tersebut meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern merupakan kritik terhadap otentisitas sumber-sumber sejarah yang ada. Beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam kritik ekstern antara lain mengidentifikasi sumber dan melakukan perbandingan antar sumber. Sedangkan kritik intern merupakan penilaian atas kredibilitas sumber sejarah itu sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan kolasi, yaitu membandingkan antara isi satu sumber dengan sumber yang lain.

3. Interpretasi

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Interpretasi dalam sejarah sering disebut analisis sejarah yaitu peneliti menguraikan data sejarah yang telah ditemukan sebagai bahan kajian ilmiah. Dalam penafsiran atas fakta, peneliti akan berusaha untuk bersikap obyektif.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penelitian, maka perlu adanya sistematika pembahasan yaitu; bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan. Dalam bab ini dijelaskan keadaan

geografis, demografis Negara Bagian Arakan. Selanjutnya dibahas mengenai periodisasi Islam di Arakan mulai dari awal mula masuknya Islam di Arakan sampai masa awal kemerdekaan.

Bab ketiga membahas mengenai kemunculan gerakan Mujahidin Rohingya. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang kemunculan gerakan Mujahidin Rohingya. Selanjutnya digambarkan sosok gerakan Mujahidin Rohingya sebagai salah satu kelompok umat Islam di Arakan. Termasuk di dalamnya dijelaskan visi dan misi dari gerakan Mujahidin Rohingya. Selain itu dibahas pula kegiatan-kegiatan dari gerakan Mujahidin seperti pelatihan militer terhadap anggotanya.

Bab keempat membahas mengenai bentuk perlawanan gerakan Mujahidin Rohingya terhadap kebijakan politik pemerintah Myanmar. Dalam bab ini dijelaskan bentuk-bentuk kebijakan politik dan pengaruhnya terhadap muslim Rohingya. Hal tersebut sebagai alasan munculnya perlawanan dari gerakan Mujahidin. Selanjutnya dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan gerakan Mujahidin Rohingya.

Bab kelima yaitu sebagai penutup dari penelitian ini yang mengutarakan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948, perdana menteri pertama yaitu U Nu memegang otoritas tinggi di negara Myanmar. Ada beberapa kebijakan politik yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan umat dari perdana menteri tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah hanya terfokus untuk kebaikan pada etnis mayoritas yang beragama Budha. Sedangkan etnis lain terutama penduduk Myanmar yang muslim dirugikan dengan kebijakan yang dijalankan. Jadi dengan keadaan seperti itu muncul berbagai respon penolakan dari etnis minoritas terutama muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan. Yang paling kentara dari etnis muslim Rohingya adalah perlawanan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin.

Kebijakan yang dianggap menyimpang dari pemerintah pusat antara lain ditetapkannya Budha sebagai agama resmi. Hal ini dikarenakan mayoritas warga Myanmar penganut agama Budha. Adanya penekanan terhadap agama Budha untuk masyarakat Myanmar berpengaruh terhadap kebijakan lain. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan di negara Myanmar. Di sekolah pemerintah dalam kurikulumnya dimasukkannya ajaran-ajaran Budha. Selain itu dalam pengajarannya menggunakan bahasa Myanmar. Oleh karena itu penduduk Myanmar yang minoritas dari etnis lain jika ingin

sekolah di sekolah pemerintah harus belajar bahasa Myanmar dan siap untuk menerima ajaran Budha.

Dampak lain dari kebijakan U Nu mengenai Budha sebagai agama Negara terhadap pendidikan adalah dengan membatasi sekolah agama untuk etnis minoritas. Seperti muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan yang kesulitan mendapatkan ajaran agama Islam di sekolahan. Jadi dengan keadaan seperti itu muncul respon dari gerakan Mujahidin Rohingya. Jafar Kawwal selaku pemimpin gerakan Mujahidin menuntut pemerintah supaya bisa mendirikan sekolah yang berbasis Islam di Negara Bagian Arakan. Selain itu menuntut supaya bahasa Urdu digunakan sebagai pengantar dalam mengajar. Dengan demikian muslim Rohingya bisa mencetak generasi cendekiawan muslim.

Kebijakan Perdana Menteri U Nu dalam pelaksanaan struktural politik adalah dilandaskan pada Budhisme. Kebijakan tersebut bertujuan untuk pembinaan karakter yang disesuaikan dengan kitab ajaran Budha Theravada yaitu Kanon Pali. Oleh karena itu, untuk menjalankan kebijakan tersebut maka orang-orang Budha ditempatkan sebagai elit politik di negara Myanmar. Seperti halnya di Negara Bagian Arakan yang perpolitikannya dikuasai oleh orang-orang Magh Budha. Pada realitanya, kekuasaan yang dimiliki elit politik dari Magh Budha telah disalahgunakan. Hal ini ditandai dengan perlakuan diskriminasi terhadap muslim Rohingya. Mulai dari pengusiran, pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan dan masih banyak lagi masalah sosial yang menimpa muslim Rohingya.

Pemerintah membatasi muslim Rohingya dalam berpartisipasi politik. Sebagai akibatnya etnis muslim Rohingya kurang mempunyai wakil dalam jajaran pemerintahan. Oleh sebab itu tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang dialaminya baik dari pemerintah pusat maupun orang Magh Budha. Jadi untuk menanggulangi masalah tersebut, gerakan Mujahidin menuntut pada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut dilakukan ketika sebuah delegasi pemerintah dikirim untuk menemui para Mujahid. Mereka menuntut adanya partisipasi politik dan penegakan HAM atas muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan.

Yang terakhir yaitu kebijakan pembentukan negara bagian yang tidak merata. Keberadaan Negara Bagian Arakan, tempat mayoritas etnis muslim Rohingya bermukim ternyata diberikan kepada orang Magh Budha. Hal ini berdampak pada eksistensi muslim Rohingya dengan berbagai masalah yang dialaminya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, gerakan Mujahidin menuntut supaya pemerintah menjadikan Negara Bagian Arakan menjadi daerah otonomi Islam. Muslim Rohingya berharap perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam diterapkan di Negara Bagian Arakan.

Berbagai masalah yang dihadapi muslim Rohingya baik pada bidang politik, sosial, maupun pendidikan juga mengundang respon dari gerakan Mujahidin untuk mengadakan pemberontakan. Jadi ketika tuntutan yang dikemukakan gerakan Mujahidin tidak terapkan oleh pemerintah, maka gerakan tersebut lebih memilih untuk memberontak. Gerakan Mujahidin berhasil menguasai berbagai kota di Arakan dengan menaklukkan para pasukan

pemerintah dan penduduk Magh budha. Walaupun pada akhirnya gerakan tersebut mengalami kemunduran karena adanya operasi militer dari pemerintah pusat.

B. Kritik dan Saran

Sebelum menulis sebuah kejadian sejarah, sebaiknya seorang penulis meneliti, menganalisis, secara mendalam terlebih dulu masalah yang terjadi. Seorang penulis juga harus mampu mendalami permasalahan yang diteliti sehingga fokus pada satu kajian. Dalam menuangkan kalimat ke dalam bentuk karya ilmiah penulis harus menggunakan kalimat yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar , yaitu dengan memperhatikan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Penulis harus netral dalam mengembangkan masalah yang diteliti agar tidak terjadi subjektivitas yang negatif. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Masih banyak celah dan kesempatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- _____, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988*. Skripsi Fak. Ilmu Budaya UI Depok: tidak diterbitkan, 2006.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Elposito, John L, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ensiklopedia Geografi, jilid 4, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2007.
- Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2009.
- Fuad Yusuf, Choirul. dkk., *Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, 2013.
- Hardiman, Budi, *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kettani, M. Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, terj. Zarkowi Soejoeti, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Muzani, Saiful, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993.

Nasikun, Mohtar Masoed, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1987.

Negara dan Bangsa, jilid 3, Jakarta: Grolier Internasional, 1988.

Okawa, Ryuho, *Hakikat Ajaran Budha: Jalan Menuju Pencerahan*, Yogyakarta: Saujana Jogjakarta, 2004.

Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sarkisyanz, Manuel, *Studies On Asia: On the Place of U Nu's Buddhist Socialism in Burma's History of Ideas*, West Germany: University of Nebraska Press, 1961.

Sigh, Bilveer, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, terj. Nin Bakdisoemanto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Sihbudi, Riza, dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara: kasus Moro, Pattani, dan Rohingya*, Jakarta: PPW-LIPI, 2000.

Sudharmono, *Sejarah Asia Tenggara Modern: dari Penjajahan ke Kemerdekaan*, Yogyakarta: Ombak, 2002.

Sutrisno, Fx. Mudji, *Buddhisme Pengaruhnya dalam Abad Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.

Veeger, K.J, *Realitas Sosial: Refirkis Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam cakrawala Sejarah Sosiolog*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Walton, Matthew J, *Politics in the Moral Universe: Burmese Buddhist Political Thought*. Disertasi Doktor pada Ilmu Politik Universitas Washington, 2012.

Yunus, Mohammed, *A History of Arakan (Past and Present)*, Edisi pertama diterbitkan tahun 1994, T.t., T.p.

Yegar, Moshe, *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*, United States: Lexington Books, 2002

_____, *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group*. Germany: Otto Harrassowitz, 1972.

_____, *The Crescent in Arakan*. Tersedia dalam
<http://danyawadi.wordpress.com/2012/01/06/the-crescent-in-Arakan>,
 diunduh pada 18 Februari 2015.

Sumber Internet :

<http://www.kaladanpress.org/index.php/scholar-column-mainmenu-36/36-rohingya/194-the-muslim-rohingya-of-burma.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

http://twocircles.net/2012jul29/rohingya_muslims_brief_history_persecution.html#.VOVdeC79nIU, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

<http://www.rohingyana.org/history.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2015.

<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html>, diunduh pada tanggal 28 Februari 2015.

<http://www.myanmars.net/myanmar/rakhine-state.htm>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

<http://www.aasyc.org/arakan/geography-and-location-of-arakan>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

<http://www.nationsonline.org>, diunduh pada tanggal 14 April 2015.

<http://defence.pk/threads/rohingya-refugess-in-ruill-yunan.322599/page-2>,
 diunduh pada tanggal 14 April 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Adi Saputro
TTL : Magelang, 22 Maret 1993
Alamat : Dk. Candi Pos, Ds. Sengi, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Gol Darah : O
Email : addhie.spazier@gmail.com
Twitter : @AdiSpazier

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Sewukan (Tahun 1999)
2. SD Negeri Sengi I (Tahun 2005)
3. SMP Negeri I Mungkid (Tahun 2008)
4. SMA Negeri I Dukun (Tahun 2011)

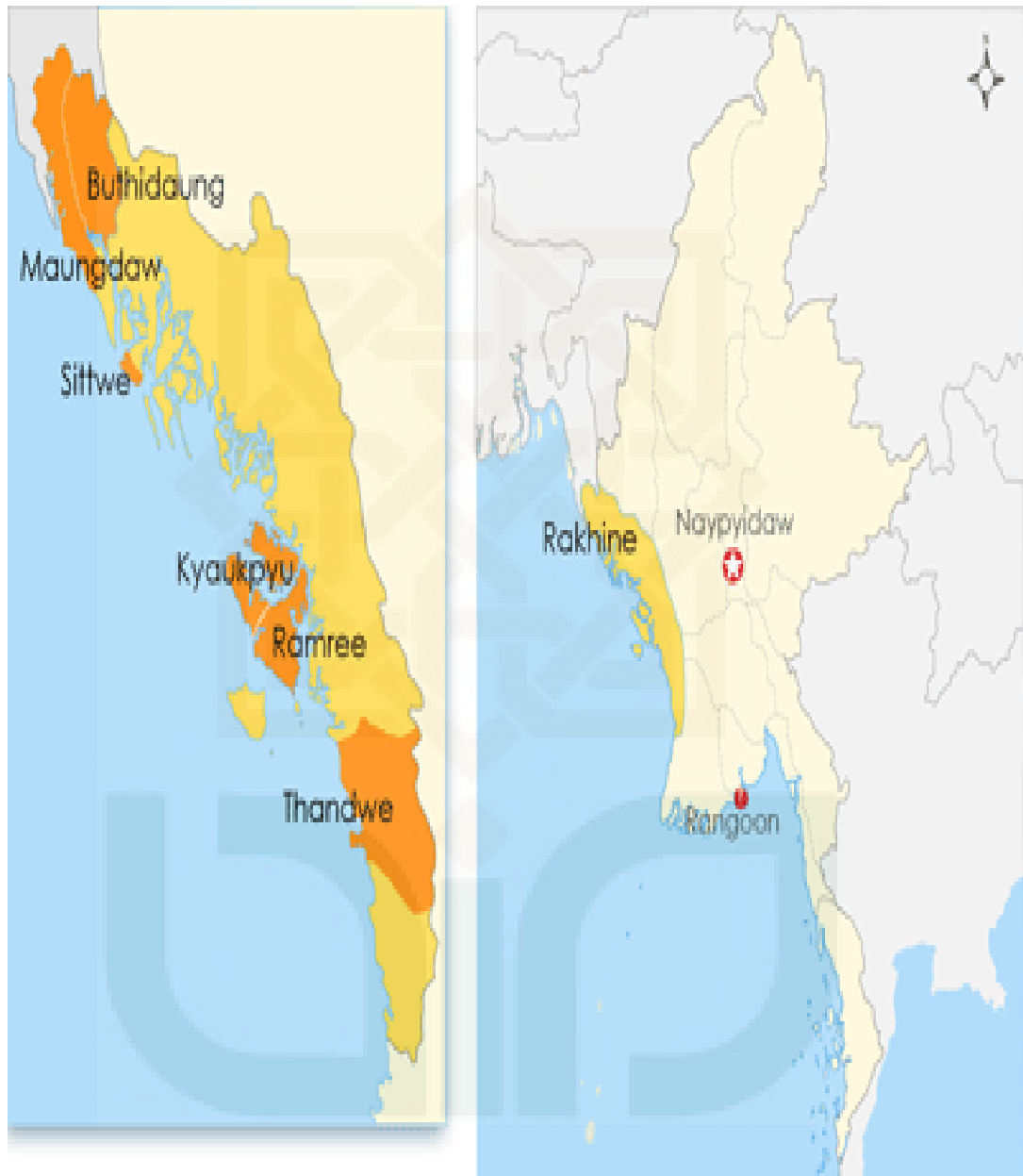
Lampiran

Gambar 1 Peta Negara Myanmar



Sumber: www.nationsonline.org , Diunduh pada tanggal 14 April 2015.

Gambar 2 Peta Negara Bagian Arakan



Sumber: [http://defence.pk/threads/rohingya-refugess-in-ruill-yunan.322599/page - 2](http://defence.pk/threads/rohingya-refugess-in-ruill-yunan.322599/page-2) , Diunduh pada tanggal 14 April 2015.